

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

- Pertama :
 - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Ketiga

- : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sclaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah terscbar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tarhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WINJOPRASONTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada *****

(7)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbandaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kaur Pertendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembar Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan

Peraturan Perundang-undangan,

(ma. Djamilah)

P. 130353307



(3)

1	2	3	4	5	6	7
13.	KALIMANTAN BARAT	<p>④ SMA Negeri 2 Telukbetung</p> <p>5. SMA Negeri 4 Tanjungkarang</p> <p>Pembukaan</p>	<p>Telukbetung</p> <p>Tanjungkarang</p> <p>Tebas</p>	<p>Kotamadya Bandar Lampung</p> <p>Kotamadya Bandar Lampung</p> <p>Kabupaten Sembas</p>	<p>09•1•2•1038•23•01•12•232 09•1•2•1038•23•01•12•233 09•1•2•1038•23•01•12•250 09•1•2•1036•23•01•12•340 09•1•2•1038•23•01•12•360</p> <p>09•1•2•1038•23•01•13•110 09•1•2•1038•23•01•13•120 09•1•2•1038•23•01•13•140 09•1•2•1038•23•01•13•210 09•1•2•1038•23•01•13•220</p> <p>09•1•2•1038•23•01•13•230 09•1•2•1038•23•01•13•231 09•1•2•1038•23•01•13•232 09•1•2•1038•23•01•13•233</p> <p>09•1•2•1038•23•01•13•250 09•1•2•1038•23•01•13•340 09•1•2•1038•23•01•13•360</p>	
14.	KALIMANTAN TENGAH	<p>1. SMA Negeri Tebas</p> <p>2. SMA Negeri Sukadana</p> <p>Fenegerian</p> <p>1. SMA Negeri Tayan Hilir</p> <p>2. SMA Negeri Sungai Pinuh</p> <p>SMA Swasta Bhakti Tayan</p> <p>SMA Swasta Karya Bhakti</p> <p>Pembukaan</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Kabupaten Kayuas</p> <p>Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Kabupaten Parito Selatan</p>	<p>09•1•2•1038•23•01•14•110 09•1•2•1038•23•01•14•120 09•1•2•1038•23•01•14•140 09•1•2•1038•23•01•14•210 09•1•2•1038•23•01•14•220 09•1•2•1038•23•01•14•230 09•1•2•1038•23•01•14•231 09•1•2•1038•23•01•14•232</p> <p>09•1•2•1038•23•01•14•233 09•1•2•1036•23•01•14•250 09•1•2•1038•23•01•14•340 09•1•2•1038•23•01•14•360</p>	(5)